



<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/8961>

HUBUNGAN BANK DUNIA DENGAN KEGAGALAN EKONOMI DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

Dede Wahyu Firdaus¹, Thomas Megantara²

^{1,2} Universitas Siliwangi, Indonesia

Email Koresponden: dede.firdaus@unsil.ac.id¹

Sejarah Artikel diterima Juli 2022, disetujui: Agustus 2022, dipublikasikan: September 2022

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana hubungan kerjasama antara Bank Dunia dengan Indonesia dan mengambil latar belakang mengenai adanya permasalahan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto atau yang sering kita kenal sebagai era Orde Baru. Korupsi, kesenjangan kesejahteraan di masyarakat, pembangunan yang tidak merata, serta inflasi di tahun 1997 merupakan beberapa masalah yang terjadi pada sektor ekonomi di Indonesia. Pada saat kondisi ekonomi Indonesia terpuruk sepeninggal pemerintahan Soekarno, Indonesia kemudian menjalin kerjasama dengan Bank Dunia melalui bantuan dana dengan syarat harus mengikuti *Structural Adjustment Programs* (SAPs). Tujuan dari SAPs adalah supaya Indonesia menjadi negara yang terbuka terhadap penanaman modal dari investor asing sehingga perekonomian Indonesia dapat stabil. Penelitian ini akan berpedoman pada metode sejarah dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah ketika Indonesia mengalami krisis moneter, ada hubungannya dengan pemberian dana bantuan dan program SAPs dari Bank Dunia, karena dengan adanya dana bantuan tersebut Indonesia menjadi terjerat utang yang tinggi dan lagi dana bantuan tersebut banyak dikorupsi. Selain itu, program SAPs menjadikan Indonesia terbuka dengan investor asing yang membuat sektor-sektor penting dikuasai oleh perusahaan asing dan ketika terjadi krisis para investor tersebut pergi meninggalkan Indonesia.

Kata Kunci: Sektor Ekonomi, Bank Dunia, Orde Baru.

Abstract

This study examines the cooperative relationship between the World Bank with Indonesia and takes the background of the economic problems in Indonesia during the Soeharto era or what we often know as the era Orde Baru. Corruption, wealth inequality in society, uneven development, and inflation in 1997 were some of the problems that occurred in the economic sector in Indonesia. When Indonesia's economic conditions slumped after the death of the Soekarno government, Indonesia then collaborated with the World Bank through financial assistance on the condition that they had to follow *Structural Adjustment Programs* (SAPs). The purpose of SAPs is for Indonesia to become a country that is open to investment from foreign investors so that the Indonesian economy can be stable. This research will be guided by the historical method with data collection techniques in the form of literature study. The result of this study is that when Indonesia experienced a monetary crisis, it had something to do with the provision of aid funds and the SAPs program from the World Bank, because with these aid funds, Indonesia became entangled in high debt and again the aid funds were heavily corrupted. In addition, the SAPs program makes Indonesia open to foreign investors which makes important sectors controlled by foreign companies and when a crisis occurs these investors leave Indonesia.

Keywords: Economic Sector, World Bank, Orde Baru

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan dari suatu pembangunan dan kemapanan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu upaya peningkatan produksi untuk mencapai output, dan alat ukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) suatu wilayah. Menurut Harrod-Domar. Aspek penting dari pertumbuhan ekonomi adalah adanya kepercayaan investor dan efektifnya aktivitas pasar bebas. Semakin tinggi investasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Adisasmita, 2013: 4).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami kendala yaitu adanya krisis ekonomi. Hal ini terjadi di Indonesia yang pernah mengalami krisis ekonomi pada 1997 dan Indonesia pada waktu itu mengalami *collaps*, padahal Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pesat dari 1980 hingga 1990-an. Badai krisis tersebut mengakibatkan bangunan ekonomi Indonesia mengalami keruntuhan dan berdampak pada situasi sosial dan politik. Kegagalan membangun perekonomian tersebut tercermin dari lambatnya pemulihan ekonomi mereka pasca krisis. Faktor kegagalan tersebut adalah adanya praktik korupsi, monopoli ekonomi oleh perusahaan milik keluarga Cendana, dan kapitalisme menyebabkan matinya usaha rakyat, sehingga kesenjangan ekonomi terbentang nyata. Faktor utama dari hal tersebut adalah pemerintahan Orde Baru bergantung pada utang dan bantuan luar negeri. Ditambah lagi, utang-utang luar negeri dari IMF dan Bank Dunia banyak dikorupsi oleh orang disekeliling Soeharto (Muhaimin, 2014: 1).

Permasalahan ekonomi Indonesia memiliki kaitan yang kuat dengan Bank Dunia. Bank Dunia merupakan lembaga keuangan internasional yang memiliki tujuan memberantas kemiskinan dan memperbaiki kehidupan masyarakat melalui pemberian saran dan pemberian bantuan dana untuk sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pengelolaan sumber daya alam. Bank Dunia telah berdiri sejak 27 Desember 1945. Sejarahnya adalah ketika 45 negara berkumpul pada Juli 1944 di Bretton Woods, Amerika Serikat, dan membentuk *The International Bank for Reconstruction and*

Development atau IBRD. Tujuan dari dibentuknya IBRD adalah agar membantu kembali ekonomi Eropa Barat yang telah hancur pasca terjadinya Perang Dunia II. Tidak lama setelah itu, perhatian juga bergeser pada negara-negara di Selatan yang juga korban Perang Dunia II, maka diubahlah nama IBRD menjadi Bank Dunia pada 27 Desember 1945 (Toussaint & Millet, 2019: 59-60).

Indonesia baru masuk sebagai keanggotaan dari Bank Dunia adalah mulai dari tahun 1967 atau pada masa pemerintahan Soeharto atau yang dikenal sebagai pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru ini adalah rezim kedua setelah pemerintahan Ir. Soekarno mulai dari 1966 hingga 1998. Rezim Orde Baru memainkan peranan yang lihai dalam ekonomi, mereka memberikan rasa aman kepada investor asing dan dalam negeri, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat. Namun, konsekuensi diterima adalah tidak adanya pembangunan politik yang elementer. Soeharto dan sekutunya melakukan “politik penyingkiran” kepada pihak-pihak yang berseberangan. Selain itu, penguatan institusi ABRI yang secara politis hanya berfungsi sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto. Ditambah lagi, gemerlap kemajuan ekonomi hanya dirasakan di pulau Jawa saja, khususnya di Jakarta, namun tidak ada perhatian yang lebih terhadap wilayah lain dan hanya dijadikan sebagai lahan eksploitasi untuk kepentingan kapitalis saja (Winters, 1999: 2).

Pemerintahan Soeharto mendapatkan warisan masalah dari rezim Soekarno. Pada akhir 1966 kondisi ekonomi Indonesia memprihatinkan, angka inflasi mencapai 650%, rupiah terus dicetak, namun sektor produksi terus turun. Pemerintahan berganti, kini Soeharto yang memegang kendali Indonesia. Pemerintahan Soeharto dalam memulihkan kestabilan ekonomi dilakukan kerjasama Bank Dunia dan IMF. Tiga poros tersebut kemudian membentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut *Inter Government Group on Indonesia* (IGGI) yang bertujuan untuk membiayai pembangunan ekonomi Indonesia (Fahrika, 2020: 7-8). Perlahan-lahan, permasalahan ekonomi Indonesia mulai teratasi, namun pada tahun 1970-an terjadi krisis minyak yang berdampak pada terguncangnya ekonomi

Indonesia. Indonesia diambang krisis, akhirnya Bank Dunia kemudian mengeluarkan program *Structural Adjustment Programs* (SAPs) yang merupakan program agar Indonesia dapat menciptakan iklim pasar yang lebih kompetitif melalui liberalisasi, mendorong kegiatan swasta, melakukan devaluasi nilai mata uang, penghapusan subsidi, mengeliminasi peraturan bea cukai, membuka lebar investasi, dan privatisasi aset BUMN (Toussaint & Millet, 2019: 100).

Menurut para ahli, SAPs ini merupakan sebuah bentuk baru penjajahan atau kolonialisasi yang terlembaga dan sistematis terhadap negara-negara berkembang. Kini, kolonialisasi bukan hanya sekadar militer dan perang, uang sendiri dapat membuat suatu negara menjadi terjajah dan tunduk terhadap suatu sistem tersebut, dan akhirnya kekayaan alam menjadi tergadaikan (Toussaint & Millet, 2019: 420). Indonesia juga mengalami gagal bayar pada 1997, dampaknya adalah Soeharto dijatuhkan pada 1998, rakyat dan pemerintahan berikutnya yang memikul utang-utang trilyunan tersebut. Keputusan rezim Soeharto menerima bantuan “gratis” dari Bank Dunia tersebut pada kenyataannya jelas akan berdampak pada generasi berikutnya.

Dalam penelitian ini membahas tentang kondisi perekonomian di Indonesia dari yang awalnya disegani sebagai “Macan Asia” hingga Indonesia mengalami krisis ekonomi besar-besaran pada 1997-1998. Beberapa pihak berpendapat bahwa, kehancuran ekonomi Indonesia turut disebabkan pula oleh Bank Dunia dan IMF yang memberikan dana segar untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan Indonesia, namun dana-dana tersebut ternyata “bocor” kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga rencana pembangunan ekonomi Indonesia ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, malah menimbulkan jeratan utang yang luar biasa beserta dengan konsekuensi yang dibawa seperti penguasaan kekayaan alam Indonesia oleh perusahaan asing, pembangunan yang sentralistik, dan penguasaan kekayaan oleh orang-orang yang berada di sekeliling Soeharto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berpedoman pada metode sejarah yang berdasarkan pada pendapat Kuntowijoyo, bahwa tahapan dalam penelitian sejarah yaitu (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi yang berkaitan dengan kritik sejarah, keabsahan sumber, dan relevansi sumber, (4) interpretasi (analisis dan sintesis), serta (5) penulisan sejarah atau historiografi (Kuntowijoyo, 2013: 91). Dalam penelitian ini, peneliti menemukan topik tentang adanya permasalahan tentang penyebab krisis moneter Indonesia dan dampak yang terjadi pasca pemerintahan Orde Baru disebabkan oleh adanya utang terhadap Bank Dunia serta IMF yang kemudian mengintervensi kebijakan pemerintahan Orde Baru. Kemudian pengumpulan sumber yang dilakukan peneliti adalah dengan mengumpulkan dokumen arsip, buku, dan artikel ilmiah dalam jurnal. Selanjutnya, verifikasi sumber dilakukan dengan menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan sehingga terbagi ke dalam kategori sumber primer dan sekunder. Terakhir, dilakukan penyusunan ulang menjadi sebuah tulisan sejarah atau historiografi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Awal Mula Kerjasama Bank Dunia dengan Indonesia

Indonesia mengalami kondisi perekonomian yang buruk menjelang akhir kepemimpinan Presiden Soekarno. Menurut Radius Prawiro, Indonesia mengalami inflasi sebesar 650%, rupiah dicetak terus-menerus, produksi terus merosot, kebijakan Berdiri Di Atas Kaki Sendiri (Berdikari) membuat semua impor pangan dan impor barang dihentikan, terutama impor beras sudah dihentikan sejak 1964 yang membuat persediaan pangan nasional semakin menipis. Cadangan devisa emas nasional dari yang awalnya sebesar \$408,9 juta pada 1960 menjadi – \$4,5 juta pada 1966, kurs rupiah merosot dari Rp. 186,67/Dollar AS (1961) menjadi Rp. 14.083/Dollar AS (Prawiro, 1998: 21). Hal tersebut karena pemerintahan Soekarno sangat anti kepada Barat beserta seperangkat sistem neoliberal dan

neocolonial yang mereka tawarkan, sehingga pihak Barat memusuhi Soekarno dengan berbagai siasat untuk meruntuhkan Indonesia. Merosotnya perekonomian turut mempengaruhi pula gejolak politik pada saat itu dengan terjadi kudeta gagal dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Setelah adanya peristiwa berdarah tersebut tepatnya pada Maret 1966 terjadi *transfer* kekuasaan dari Ir. Soekarno kepada Soeharto. Di sisi lain, dunia barat merasa berhutang budi kepada Soeharto karena telah menggulingkan rezim Soekarno yang merupakan simbol penting bagi negara berkembang. Maka, pihak barat mulai mendekati pemerintahan Soeharto dengan menjalin kembali hubungan baik melalui tawaran bergabung dengan PBB, masuk menjadi anggota Bank Dunia dan IMF. Sebenarnya, keinginan terselubung pihak barat adalah tidak ingin membuat Indonesia menjadi negara maju dengan cara mengekang rakyatnya melalui pemerintahan otoriter, mendepolitisasi rakyat, dan menjauhkan rakyatnya dari pusat kehidupan ekonomi dan politik. Hal-hal tersebut disembunyikan dibalik dukungan moneter dan teknis (Tambunan, 2006).

Indonesia ditangan Soeharto berada pada sistem negara yang militeristik dan otoriter terhadap rakyatnya, namun sangat lunak terhadap investor. Pada masa Orde Baru, pola perekonomian cenderung lebih memihak kepada sistem kapitalis, akibatnya kesenjangan ekonomi semakin meningkat, rakyat tidak bisa bersaing dengan para investor yang memiliki modal besar. Pada masa Orde Baru, kebijakan lebih ditekankan pada penyelesaian masalah ekonomi, seperti menurunkan inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, membuka lagi impor barang, dan penyusunan target Repelita yang sangat disanjung oleh negara-negara Barat.

Pemerintah Orde Baru sendiri merasa tidak akan mampu mengatasi permasalahan perekonomian yang cukup pelik sendirian saja, mereka kemudian menggandeng kerjasama dengan Bank Dunia dan IMF pada akhir 1960-an. Bank Dunia, IMF, dan ADB sendiri kemudian membentuk suatu kelompok konsorsium *The Inter-Government Group on Indonesia* (IGGI) dan. Tujuan dari IGGI ini adalah untuk mempermudah mereka menggelontorkan dana pembangunan ekonomi kepada Indonesia (Fahrika, 2020: 7-8).

Dana yang diberikan dari IGGI ini pada awalnya masih dalam berbentuk dana hibah dan dana *soft loan* dari negara-negara sahabat. Namun, seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia kini kesulitan dalam memperoleh dana pinjaman lunak, sehingga pemerintah Orde Baru mulai menggunakan pinjaman komersial dan obligasi dari kreditur swasta Internasional (Atmadja, 2000: 88). Kemudian, perekonomian Indonesia kembali mendapatkan guncangan pada saat terjadi krisis harga minyak bumi pada akhir 1970-an yang turut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Pada masa tersebut Indonesia diambang masa krisis, pemerintah akhirnya mengambil langkah deregulasi kebijakannya dengan mengikuti saran dari Bank Dunia dan IMF.

Bank Dunia dan IMF memberikan saran agar Indonesia menerapkan kebijakan turunan dari apa yang disebut dengan *Structural Adjustment Programs* (SAPs). SAPs ini intinya adalah seperangkat kebijakan yang menunjang ekonomi neoliberal, yang sudah diterapkan di negara-negara industri sekaligus negara kreditor. Berikut ini kebijakan ekonomi yang berdasarkan pada SAPs antara lain sebagai berikut:

1. Devaluasi nilai mata uang;
2. Menghapus subsidi, anggaran untuk transportasi umum, dan bantuan sosial;
3. Liberalisasi pasar modal;
4. Liberalisasi sektor perdagangan dan pelonggaran aturan bea cukai;
5. Privatisasi aset milik negara;
6. Ramah terhadap investasi asing terutama negara-negara industri dan kreditur;
7. Modifikasi UU tenaga kerja dan menekan serendah mungkin upah buruh (Toussaint & Millet, 2019).

SAPs adalah upaya yang dilakukan oleh Bank Dunia untuk mendikte kebijakan perekonomian Indonesia, jika sudah mengikuti saran dari Bank Dunia tersebut, Indonesia akan terlilit hutang yang tidak akan terbayar, aset-aset milik negara tergadaikan, dan sumber daya alam kemudian akan menjadi milik swasta asing. Atas adanya paksaan penggunaan sistem neoliberal kepada Indonesia merupakan sebuah bentuk penjajahan baru yang lebih kejam dan sistematis, karena Indonesia akan dihadapkan pada masalah utang seperti halnya bola salju

yang dilempar, awalnya kecil tapi lama-kelamaan akan semakin membesar.

B. Intervensi Bank Dunia Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Negara-negara yang berhutang kepada Bank Dunia dan IMF dipaksa untuk menyesuaikan program kebijakannya dengan SAPs. SAPs ini adalah sebuah sistem neoliberal dan neokolonial terselubung, terlembaga, dan tersistematis membuat negara-negara berkembang akan terancam kebangkrutan. Program yang ditawarkan adalah tentang penghapusan subsidi, pemotongan anggaran bantuan sosial, devaluasi mata uang, menaikkan suku bunga, pengembangan ekspor bahan mentah, pembukaan pasar bebas dan pembebasan hambatan pabean, liberalisasi ekonomi, menaikkan pajak rakyat, dan privatisasi BUMN.

Negara yang tengah dilanda krisis dan membutuhkan bantuan keuangan dari Bank Dunia harus diwajibkan melaksanakan SAPs tersebut. Hal ini terjadi pada masa awal pemerintahan Orde Baru yang harus menghadapi keterpurukan ekonomi berupa depresi nilai mata uang, *hyperinflasi*, dan permasalahan ekonomi lainnya. Sehingga, Soeharto memulai kesepakatan dengan meminjam dana bantuan dari Bank Dunia serta diberlakukannya SAPs. Restrukturisasi ekonomi tersebut dilakukan dengan IGGI dan CGI yaitu badan yang akan memberikan saran serta bantuan dana untuk pembangunan ekonomi.

Pemerintah Indonesia kemudian membuat UU No. 1 Tahun 1967 yang mengatur tentang penanaman modal asing dan sejak saat itu Indonesia terbuka dengan para investor asing yang hendak menanamkan modalnya. UU No. 1 Tahun 1967 tentunya sangat mendukung upaya liberalisasi. Hasil dari adanya aturan tersebut mulai dari tahun 1967 hingga 1997 banyak investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Investor melirik Indonesia karena aturan yang longgar, sehingga memudahkan akses dan menurunkan biaya operasional perusahaan mereka. Ditambah lagi, kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan belum tersentuh membuat para investor asing berbondong-bondong mendirikan usahanya di Indonesia. Dampak dari adanya liberalisasi ekonomi tersebut membuat terbukanya lapangan pekerjaan secara luas, namun upah

yang didapat tidak terlalu mensejahterakan, selain itu juga subsidi bahan pokok, listrik, bahan bakar, dan sarana kesehatan tidak dapat diperoleh oleh masyarakat. Gaji yang tinggi, tidak menjamin kesejahteraan, karena kebutuhan dasar didapatkan tidak secara gratis (Prasetyantono, 2003: 117).

Tuntutan Bank Dunia terhadap pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan privatisasi BUMN, sehingga BUMN layaknya perusahaan swasta yang mencari keuntungan untuk menambal kas negara. Privatisasi BUMN tersebut seperti yang dilakukan oleh PLN, Telkom, PDAM, Krakatau Steel, Pertamina, dan BUMN lainnya. Selain itu, banyak lahan-lahan ekonomi yang digunakan untuk kebutuhan hidup orang banyak dikuasai oleh sektor privat terutama perusahaan asing seperti air mineral dikuasai Aqua, pertambangan dikuasai Freeport, Exxon, Exxon, Caltex, dan sebagainya, bidang komunikasi dikuasai oleh Indosat dan Telkom.

Penyesuaian SAPs tersebut pada awalnya berjalan baik dan memberikan peningkatan di bidang perekonomian karena kas negara kembali pulih, inflasi dapat ditekan, serta stabilitas ekonomi dapat terjalin. Namun, permasalahan terjadi ketika krisis 1997. Indonesia tidak memiliki tabungan nasional dan hanya mengandalkan utang luar negeri, sehingga pada saat krisis 1997 (krisis Asia Tenggara) melanda dan adanya ketidakstabilan politik Indonesia membuat para investor serentak menarik modal mereka (Gie, 1999: 4). Hilangnya kepercayaan pemodal Asing inilah yang membuat pembangunan ekonomi Indonesia runtuh dan penerapan SAPs gagal di Indonesia.

C. Bank Dunia Penyebab Kejatuhan Ekonomi Indonesia

Pembangunan Indonesia hingga 1997 selalu dipuji dan disanjung oleh lembaga keuangan Internasional serta negara-negara Barat. Indonesia meraih predikat sebagai negara *ajaib* yang mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi pada 1966, bahkan posisi Indonesia hampir mampu menjadi salah satu negara maju. Satu hal yang terpenting adalah semua pencapaian Indonesia tersebut didapat melalui utang.

Indonesia merasakan dampak yang nyata dari jeratan utang tersebut adalah pada saat krisis 1997. Indonesia diterpa krisis

ekonomi yang menyebabkan keruntuhan bangunan ekonomi Indonesia yang selama ini telah dibangun. Krisis 1997 tersebut membuat banyak perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan nasional bangkrut, pengangguran meningkat, angka kemiskinan naik drastis, dan ditambah lagi permasalahan bunga utang luar negeri yang semakin menumpuk dan menjerat Indonesia kepada jurang kebangkrutan. Ternyata gemerlap kemajuan dan modernisasi Indonesia yang dibangun selama pemerintahan Orde Baru.

Utang luar negeri Indonesia sampai Desember 1998 total sebanyak \$ 144,021 milyar yang terdiri dari \$83,572 milyar berasal dari kreditur swasta. Sedangkan, pada waktu itu penduduk Indonesia sebanyak 202 juta jiwa, maka beban utang perkapita mencapai \$703/tahun. Menurut laporan media harian Kompas, Indonesia baru dapat melunasi utang-utang tersebut 50 tahun mendatang, dengan asumsi seluruh rakyat Indonesia bekerja selama 24 jam dengan upah Rp. 10.000,- selama 50 tahun tersebut (Topatimasang, 1999: 173). Menurut pendapat lain, utang Indonesia yang diberikan Bank Dunia dari 1970 hingga 2002 adalah sebesar \$232 milyar. (Toussaint & Millet, 2019)

Utang luar negeri Indonesia tersebut adalah penyebab utama dari adanya krisis ekonomi 1997. Dana pinjaman Bank Dunia dan swasta tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan, namun pembangunan tersebut tidak berdasarkan mekanisme pasar yang jelas dan tidak terbuka. Selain itu, perencanaan industri yang dibuka juga tidak berdasarkan apa yang pasar inginkan, tidak objektif, dan tidak rasional. Perencanaan ekonomi tersebut hanya melakukan eksploitasi SDA dan terkesan hanya mengejar setoran dengan penjualan bahan mentah di pasaran dunia.

Pembangunan yang tidak sesuai dengan sektor produktif tersebut menyebabkan kredit macet dan Indonesia perlahan-lahan gagal bayar. Celaknya, bantuan utang-utang luar negeri yang berasal dari negara-negara donor dan lembaga keuangan internasional (Bank Dunia dan IMF) banyak yang dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Prof. Soemitro Djojohadikusumo, tingkat kebocoran tersebut mencapai angka 30% dari total anggaran pembangunan yang

keluar (Muhaimin, 2014: 1). Sedangkan menurut pendapat lain yang sejalan yaitu menurut Jeffrey A. Winters, bantuan dari Bank Dunia kepada Indonesia mengalami kebocoran di tingkat birokrasi (Winters, 1999). Kemudian menurut Eric Toussaint, utang negara yang rapih oleh orang-orang pendukung rezim Soeharto sebanyak \$35 milyar (Toussaint & Millet, 2019).

Secara moral, pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya Indonesia terhadap jeratan utang dan krisis keuangan tersebut adalah Bank Dunia. Namun, pihak Bank Dunia yang diwakili oleh Dennis de Tray melakukan cuci tangan atas segala kesalahan tersebut dengan menyatakan bahwa proyek pembangunan dan program restrukturisasi (SAPs) bukanlah program dari Bank Dunia, melainkan program dari pemerintah Orde Baru itu sendiri. Tambahan lagi, berbagai kebocoran keuangan dari proyek-proyek tersebut bukanlah murni kesalahan Bank Dunia, namun pemerintah Orde Baru yang bertanggung jawab melindungi dan memastikan uang pinjaman tersebut dipakai sesuai tujuan.

Memang kesalahan kebocoran dana pinjaman Bank Dunia diambil oleh elit-elit birokrasi dan orang-orang Cendana, namun Bank Dunia seharusnya mengambil langkah-langkah untuk menghentikan praktik korupsi tersebut. Pada kenyataannya, beban hukum tetap ditanggung oleh pemerintah Indonesia, ditambah lagi beban finansial beserta dengan milyaran utang yang tidak pernah digunakan untuk kepentingan umum, kini menjadi tanggungan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) Piagam Bank Dunia, terdapat kalimat bahwa Bank Dunia bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan dana pinjaman tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, Bank Dunia juga bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang telah disepakati sesuai tujuan peminjam. Kondisi di lapangan memang benar Bank Dunia mengawasi proyek-proyek tersebut, namun mereka tidak memastikan langsung, hanya menerima laporan dari manajer proyek lokal dan laporan tersebut sudah dimanipulasi sedemikian rupa. Seperti diketahui, sistem pelaporan hanya berjalan jika disertai audit yang bersifat acak dan mendadak. Pihak Bank Dunia juga tidak melakukan investigasi

yang mendalam terkait penggunaan dana tersebut. (Winters, 1999: 57-58)

Bukti jelas sudah terlihat bahwa, Bank Dunia harus bertanggungjawab atas hilangnya dana \$10 Milyar. Laporan tentang ebocoran dana Bank Dunia juga diungkapkan oleh para staff Bank Dunia di Jakarta dan di Amerika Serikat. Selama 1990-1997, dana bantuan Bank Dunia tersebut telah dicuri sebanyak sepertiganya. Para petinggi Bank Dunia tidak peduli tentang adanya tindakan pencurian tersebut. Seharusnya ketika mengendus adanya penyelewengan dana tersebut, Bank Dunia segera menghentikan penggelontoran dana kepada Indonesia, hal ini sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Piagam Bank Dunia.

Bank Dunia memiliki tanggungjawab penuh untuk mengendalikan kebocoran yang terjadi di dalam proyek pembangunan Indonesia. Hal ini berdasarkan dengan apa yang tercantum pada Piagam Bank Dunia yang menyatakan bahwa Bank Dunia wajib mengawasi dan menjaga dana bantuan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Atas adanya kebocoran dana kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebesar \$10 - \$35 Milyar menyebabkan pembangunan ekonomi menjadi tersendat. Walaupun negara terlihat modern dan maju, namun keuangan negara hanya digunakan untuk membayar utang.

KESIMPULAN

Kondisi perekonomian Indonesia mengalami krisis pada masa akhir pemerintahan Soekarno. Pada waktu itu angka inflasi mencapai %650, cadangan devisa emas nasional dari yang awalnya sebesar \$408,9 juta pada 1960 menjadi – \$4,5 juta pada 1966, kurs rupiah merosot dari Rp. 186,67/Dollar AS (1961) menjadi Rp. 14.083/Dollar AS. Permasalahan tersebut menjadi beban pada masa awal pemerintahan Soeharto. Atas adanya krisis tersebut Soeharto bekerja sama dengan Bank Dunia serta IMF agar Indonesia dapat memperoleh dana bantuan untuk menstabilkan ekonomi Indonesia.

Prasyarat untuk menjadi negara yang mendapat bantuan dari Bank Dunia dan IMF adalah kebijakannya harus mengikuti apa yang disarankan mereka atau sesuai *Structural Adjustment Programs* (SAPs). SAPs ini berupa penghapusan subsidi,

pemotongan anggaran bantuan sosial, devaluasi mata uang, menaikkan suku bunga, pengembangan ekspor bahan mentah, pembukaan pasar bebas dan pembebasan hambatan pabean, liberalisasi ekonomi, menaikkan pajak rakyat, dan privatisasi BUMN. SAPs adalah upaya yang dilakukan oleh Bank Dunia untuk mendikte kebijakan perekonomian Indonesia.

Penyesuaian SAPs tersebut pada awalnya berjalan baik dan memberikan peningkatan di bidang perekonomian karena kas negara kembali pulih, inflasi dapat ditekan, serta stabilitas ekonomi dapat terjalin. Namun, permasalahan terjadi ketika krisis 1997. Indonesia tidak memiliki tabungan nasional dan hanya mengandalkan utang luar negeri, sehingga pada saat krisis 1997 (krisis Asia Tenggara) melanda dan adanya ketidakstabilan politik Indonesia membuat para investor serentak menarik modal mereka.

Permasalahan krisis 1997 yang membuat Indonesia gagal membangun perekonomiannya adalah karena adanya kebocoran akibat dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, sehingga dana pinjaman dari Bank Dunia tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan untuk program pembangunan Indonesia. Sebenarnya, penanggulangan penyelewengan dana ini menjadi tanggungjawab dari Bank Dunia.

Bank Dunia memiliki tanggungjawab penuh untuk mengendalikan kebocoran yang terjadi di dalam proyek pembangunan Indonesia. Hal ini berdasarkan dengan apa yang tercantum pada Piagam Bank Dunia yang menyatakan bahwa Bank Dunia wajib mengawasi dan menjaga dana bantuan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Atas adanya kebocoran dana kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebesar \$10 - \$35 Milyar menyebabkan pembangunan ekonomi menjadi tersendat. Walaupun negara terlihat modern dan maju, namun keuangan negara hanya digunakan untuk membayar utang.

Pada intinya, kehancuran ekonomi Indonesia pada 1997 dan selama periode pemerintahan Soeharto memiliki hubungan erat dengan pinjaman dana dari Bank Dunia dan IMF. Pemerintahan Soeharto perlahan-lahan terjerat utang yang memuncak pada 1997 ketika krisis Asia Tenggara dan dinamika politik Indonesia yang membuat

investor lari, sehingga menyebabkan Indonesia mengalami kehancuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atmadja, A. S. (2000). Utang Luar Negeri Pemerintahan Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(1), 83–94.
- Fahrika, A. I. (2020). *Perekonomian Indonesia: Sejarah dan Perkembangan*. Makassar: Yayasan Barcode.
- Gie, K. K. (1999). *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Trasisi Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muhaimin. (2014). Masalah Hutang Luar Negeri Indonesia dan Alternatif Solusinya dalam Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro Islam. *At-Taradhi*, 5(2).
- Prasentiantono, T. (2003). *IMF (Internasional Monetary Fund) Dalam Neoliberalisme*. Yogyakarta: Pustaka Rakyat Cerdas.
- Prawiro, R. (1998). *Pergulatan Indonesia membangun ekonomi: pragmatisme dalam aksi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tambunan, T. (2006). *Perekonomian Indonesia Sejak Masa Orde Lama Hingga Pasca Krisis*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Topatimasang, R. (1999). *Hutang Itu Hutang*. Yogyakarta: Saint Joseph University.
- Toussaint, E., & Millet, D. (2019). *Mafia Bank Dunia & IMF: Alat Penjajahan Baru Negara Industri Terhadap Negara Berkembang Sejak Akhir Perang Dunia II*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Winters, J. A. (1999). *Dosa-Dosa Politik Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Djambatan.